BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Konsep

1. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan adalah perkumpulan sosial dibentuk masyarakat atau berkumpulnya banyak orang dengan melakukan sesuatu hal tertentu dan memiliki tujuan yang sama. Sebuah organisasi dapat dibentuk karena dipengaruhi beberapa aspek, adapun aspek yang dimaksud diantaranya penyatuan visi, misi, serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang.

Adanya organisasi masyarakat telah diatur oleh pemerintah dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985 mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Menurut UU RI Nomor 8 tahun 1985 pasal 1 Organisasi Masyarakat dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakatan telah ditetapkan Pasal 2 UU Nomor 8 tahun 1985 bahwa Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara). Sedangkan pada Pasal 3 telah ditetapkannya tujuan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi Kemasyarakatan yaitu Kekhususan Ormas seperti yang ada saat ini, contohnya dalam bidang lingkungan hidup (Walhi, Kalhi, dll), hukum, Agama, Budaya, Kesehatan. Organisasi Kemasyarakatan memiliki satu sifat kekhususan dengan memiliki kesamaan, misalnya kesamaan profesi, kegiatan, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan.

Pada Pasal 5d UU Nomor 8 tahun 1985 bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki sarana aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Menurut pakar bernama Herbert G. Hicks mengemukakan beberapa alasan bagaimana organisasi kemasyarakatan bisa terbentuk. Manusia sebagai *zoon politicon* atau makhluk hidup yang secara berkelompok, maka manusia mersa memerlukan adanya perkumpulan atau berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Selanjutnya dapat saling tolong menolong, karena seringkali bantuan organisasi manusia dapat dilakukan sehingga akan meringankan beban seseorang jika terdapat kesulitan yang dihadapi anggota organisasi. Pengetahuan merupakan alasan berikutnya karena pengetahuan yang diperoleh generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun.

Organisasi Kemasyarakatn juga memiliki beberapa fungsi menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985. Bahwa Organisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemasyarakatan sebagai wadah penyalur kegiatan karena organisasi kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya masing-masing. Maka sudah semestinya apabila organisasi kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya. Bukan hanya itu, organisasi mempunyai kegunaan yaitu sebagai pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi. Hal ini berarti bahwa organisasi kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempaan kepemimpinan dan peningkatan ketrampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan di segala bidang. Peran serta pembangunan nasional akan tercapai karena adanya organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila.

2. Aisyiyah

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia, lahir pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 tepat di Kampung Kauman memiliki tujuan menjunjung dan menegakkan syariat agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adil, makmur dan diridhoi oleh Allah SWT. Muhammadiyah lahir karena keprihatinan dari seorang tokoh atau ulama yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan pada saat itu melihat adanya kondisi masyarakat Islam dalam kehidupan yang masih banyak hal-hal yang menyimpang, seperti kelemahan pendidikan Islam, dan masuknya budaya lain yang dianut kebanyakan masyarakat dalam ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan gerakan pembaharu muncul akibat pada saat itu keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang. Sedangkan ketika itu beliau merupakan pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan seorang pedagang.

Muhammadiyah menginginkan umat Islam kembali pada ajaran Islam yang sebenar-benarnya dengan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar yaitu menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari hal yang munkar sesuai dengan surat Ali Imran ayat 104. Sehingga dakwah yang dijalankan Muhammadiyah merupakan refleksi pada perintah Al-Qurán.

Organisasi ini dari waktu ke waktu terus berkembang serta memberikan manfaat pada masyarakat luas. Misalnya dengan mendirikan banyak amal usaha yang berkembang dengan baik. Pembinaan terhadap kaum wanita juga merupakan suatu kekhususan yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Sejak didirikannya Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan kaum wanita. Pada saat itu beliau bersama istrinya Siti Walidah melihat potensi yang dimiliki kaum wanita untuk dijadikan pemimpin serta pengurus dalam organisasi wanita.dengan membina mereka seta mendidik mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok pengajian pertama didirikan dengan nama “Sopo Tresno”degan beranggotakan kaum wanita saja dengan anggota dari berbagai usia. Pemberian nama tersebut merupakan hal yang kongkrit dan jelas, sehingga KH. Ahmad Dahlan mengadakan pertemuan dengan para tokoh Muhammadiyah lainnya, diantaranya KH. Mokhtar, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Fakhruddin, serta Pimpinan Muhammadiyah lainnya. Pemberian nama muncul pertama kali dalam rapat adalah “Fatimah”, tetapi kurang disetujui anggota rapat, sehingga KH. Fakhruddin memberikan usulan agar diberi nama Äisyiyah” dan disetujui oleh para anggota forum rapat. Peresmian berdirinya Aisyiyah yaitu pada tanggal 27 Rajab 1433 H yang bertepatan dengan 19 Mei 1917 bersamaan dengan peringatan Isra’ Mi’raj. ‘Aisyiyah pertama kali dipimpin oleh Siti Bariyah berdasarkan hasil konggres Muhammadiyah. Yang memimpin pada periode 1917-1920.

Selaku organisasi komponen perempuan gerakan Islam Muhammadiyah, Aisyiyah mempunyai peran dan melakukan usaha untuk memperbaharui/memperbaiki pemahaman terhadap agama Islam untuk dikembalikan pada ajaran Islam yang murni yang bersumber pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Selain itu ‘Aisyiyah sudah mulai merintis Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang kemudian berkembang menjadi Taman Kanak-kanak bernama TK Bustanul Athfal, yang kemudian dilanjutkan merintis sekolah-sekolah tingkat yang lebih atas. Selain itu Aisyyah juga berperan untuk mengintensifkan pembinaan ideologis sebagai bagian dari revitalisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan, dinamisasi pemikiran, orientasi aksi gerakan, dan pelangsung gerakan Muhammadiyah sesuai bidang gerakannya.

Seperti halnya Muhammadiyah, berdirinya Aisyiyah dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan mendalam akan kondisi bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan. Pada awal abad ke 20, paham budaya yang mensubordinasi derajat dan kedudukan kaum perempuan telah menjadi sumber kebodohan dan ketertinggalan.[1]

Semuanya bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan ajaran Nabi, memang pada waktu itu masyarakat mengalami krisis, umat Islam sudah melupakan tuntunan ajaran Islam yang murni, mereka membuat bid'ah, khurafat, dan syirik, ini yang membuat mereka jauh dari tuntunan agama yang sebenarnya.

3. Muslimat

Muslimat Nahdhatul Ulama merupakan organisasi wanita di Indonesia dan sebagai salah satu badan otonom Nahdhatul Ulama. Sejarah pergerakan wanita Nahdhatul Ulama memiliki sejarah panjang dengan memunculkan berbagai gerakan wanita baik Muslimat, Fatayat, hingga Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama.

Sejarah Muslimat NU berawal dari Muktamar XV NU, 9-15 Desember 1940 di Surabaya yang dalam salah satu poinnya menjadikan Muslimat NU bagian dari NU dengan nama NOM (Nahdlatul Oelama Moeslimat). Muktamar NU XVI yang berlangsung dari tanggal 26-29 Maret 1946 di

[1] http://aisyiyahpusat.or.id/profil/2/8 diakses pada tanggal 7 Maret 2017 pada pukul 09.40 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purwokerto Jawa Tengah mengesahkan dan meresmikan berdirinya "Nahdlatul Oelama Moeslimat" dengan singkatan NOM, 29 Maret 1946 bertepatan dengan 26 Rabi'ul Akhir 1365 H.Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Muslimat NU sebagai wadah perjuangan wanita Islam Ahlus Sunnah Wal Jama`ah dalam mengabdi kepada agama, bangsa dan negara.Pada Muktamar NU XIX, 28 Mei 1952 di Palembang, NOM menjadi badan otonom dari NU dengan nama baru Muslimat NU.

Sejarah mencatat bahwa kongres Nahdhatul Ulama pada tahun 1938 merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi terbentuknya organisasi Muslimat Nahdhatul Ulama. Sejak kelahirannya Nahdhatul Ulama pada tahun 1926, Nahdhatul Ulama adalah organisasi yang anggotanya hanyalah kaum laki-laki. Para ulama nahdhatul Ulama saat itu masih berpendapat bahwa wanita belum masanya aktif di organisasi. Anggapan bahwa ruang gerak wanita cukup di rumah saja masih kat melekat pada umumnya warga Nahdhatul Ulama pada saat itu. Hal itu terus berlangsung hingga terjadi polarisasi pendapat yang cukup hangat tentang perlu tidaknya wanita berkecimpung di organisasi.[2]

Dalam kongres Nahdhatul Ulama, untuk pertama kalinya tampil seorang Muslimat Nahdhatul Ulama di atas podium dengan berbicara tentang perlunya wanita Nahdhatul Ulama mendapatkan hak yang sama dngan kaum lelaki dalam menerima didikan agama melalui organisasi Nahdhtul Ulama. Dalam kongres Nahdhatul Ulama ke XII yakni pada tanggal 15 Juni 1938

[2] id.m.wikipedia.org (10 Februari 2017 pukul 19.30), Situs Web Resmi Muslimat Nahdhatul Ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita telah resmi diterima menjadi anggota Nahdhatul Ulama meskipun sifat keanggotaannya hanya sebagai pendengar dan pengikut saja, tanpa diperbolehkan menduduki kursi kepengurusan. Hal seperti itu berlangsung hingga kongres Nahdhatul Ulama ke XV di Surabaya tahun 1940.

Dalam kongres tersebut terjadi pembahasan yang cukup sengit tentang usulan Muslimat yang hendak menjadi bagian tersendiri, mempunyai kepengurusan tersendiri dalam Nahdhatul Ulama. Banyak terjadi pro kontra menyangkut penerimaan usulan tersebut, sehingga kongres sepakat menyerahkan perkara itu kepada PB Syuriah untuk diputuskan.

Bersamaan dengan kongres Nahdhatul Ulama yakni kongres Nahdhatul Ulama ke XVI organisasi Muslimat Nahdhatul Ulama secara resmi dibentuk, tepatnya pada tanggal 29 Maret 1946. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Muslimat Nahdhatul Ulama sebagai wadah perjuangan wanita Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam mengabdi kepada agama, bangsa dan Negara. Pada saat itu ketua Muslimat Nahdhatul Ulama diketuai oleh Khadijah Dahlan asal Pasuruan, yakni merupakan istri dari pencetus lahirnya Muslimat Nahdhatul Ulama yang bernama Dahlan.[3]

Muslimat NU berakidah atau berasas Islam, menurut faham Ahlus Sunnah Waljama`ah dan menganut salah satu dari madzhab empat: Hanafi, Syafi`i, Hambali dan Maliki. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Muslimat NU berpedoman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh

[3] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tujuan Muslimat NU adalah terwujudnya perempuan Indonesia yang sadar beragama berbangsa dan bernegara, berkualitas, mandiri dan bertakwa kepada Allah SWT, sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, terlaksananya tujuan Jam`iyah NU yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah SWT. (Kongres 15 MNU.Materi Kongres XV MNU.2005-2010: 23-27).

Pada perkembangan selanjutnya, Muslimat NU bergabung dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani), disini Kowani merupakan kelanjutan dari Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1928 sejak tahun 1956. Peran Muslimat NU di Kowani mulai terlihat dalam dekade 1960-an. Peran Muslimat NU pada tahun 1967 terlihat nyata, ketika Ketua Umum Muslimat saat itu, Ny. Machmudah Mawardi mendirikan Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) merupakan wadah untuk mempersatukan gerak langkah organisasi-organisasi perempuan Islam dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Pada dasarnya, Muslimat NU merupakan wadah perempuan yang secara otonom56 membidangi bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan masalah sosial kemasyarakatan. Muslimat NU mengangkat isu strategis meliputi: penataan organisasi, pemberdayaan ekonomi, advokasi, pelayanan masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

optimalisasi fungsi institusi keagamaan, penanaman dan pelaksanaan nilai-nilai Aswaja, membangun jaringan kerja dan meningkatkan kualitas SDM, yang tercantum dalam program kerja dalam 10 (sepuluh) bidang yang meliputi: bidang organisasi, da`wah, sosial dan lingkungan hidup, kesehatan dan kependudukan, Pendidikan dan pengkaderan, ekonomi-koperasi, tenaga kerja, hubungan luar negeri, penelitian dan pengembangan, Hukum dan advokasi.[4]

B. Teori

1. Teori Peran

Sejak awal kelahirannya, konsepsi peran telah menampakkan aspek kekhasan dari teori ini, sehingga analis peran tertarik akan kompleksitas aspek perilaku manusia. Hal-hal yang menarik lainnya bukan saja yang dikaitkan dengan perilaku individu. Perilaku sekelompok individu ataupun kumpulan individu. Aspek perilaku yang juga menarik perhatian adalah berbagai adegan dalam kehidupan sosial yang nyata. Bentuk perilaku yang nyata yang begitu kompleks, yang berupa kumpulan orang yang bercorak ragam posisi sosialnya, pengkhususan dan pembagian kerjanya, komunikasi, perilaku belajar dan motivasinya, cara pemberian sanksinya, konformitas serta independensi antar pelaku dalam suatu kancah sosial, semua itu menjadi ranah dalam studi peran.

[4] 7Himpunan Keputusan Kongres XV Muslimat NU, Batam, 29 Maret - 1 April 2006 (Jakarta: PP Muslimat NU periode 2006-2011), 102-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi dalam masyarakat. Seperti halnya peristiwa peran ini mengedepankan dengan pembawaan "lakon" oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku dalam *Script* (semacam skenario), instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal hampir sama. Pengaruh yang memberikan sumbangan bagi terbangunnya perspektif teori peran ini merumuskan tiga pokok yang menjadi prioritas dalam studi. *Pertama,* ranah yang luas dan pelik dari fenomena peran tersebut harus dianalisis bagian demi bagian, serta harus didefinisikan secara jelas. *Kedua,* pengartikulasian kata dalam teori peran tersebut diupayakan setepat-tepatnya dan tak ambigu yang lebih bersifat komperhensif untuk mengungkap fenomena yang relevan yang membutuhkan penyebutan, dan lebih kuat menetapkannya sebagai bahasa tunggal, yang dispakati sebagai bahasa teknis. *Ketiga,*pengetahuan teoritis dan empiris yang diperoleh di lapangan, harus ditinjau kembali, dinilai kembali serta diorganisasikan ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Peranan sosial bermula dari kata yang dipinjam dari dunia sandiwara (drama). Sebuah drama terdiri dari suatu "lakon" dan sejumlah pelaku. Lakon dipecah dalam peranan-peranan yang jumlahnya sama dengan jumlah tokoh yang hendak ditampilkan dalam pementasan itu. Pada umumnya setiap peranan (*role)* diserahkan kepada seorang pemain yang dianggap memiliki sifat-sifat dari tokoh yang dipentaskan. Seorang pelaku (pemain) harus menirukan tingkah laku tokoh yang hendak digambarkan secara konkret di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadapan para penonton. Sifatnya sementara, hanya selama drama itu brlangsung. Sebelum dan sesudahnya pelaku tresebut bertingkah laku biasa.

Istilah peranan (dalam sandiwara) oleh para ahli sosiologi dialihkan ke "panggung masyarakat", diberi isi dan fungsi baru yang disebut "peranan sosial". Terdapat perbedaan antara pengertian "peranan sandiwara" dan "peranan sosial". Perbedaan yang terpenting ialah bahwa pelaku-pelaku peranan sosial tidak mementaskan tokoh-tokoh yang khayal, tetapi tokoh yang nyata dan masih ada, yang tak lain "pemain itu sendiri". Pementasan juga tidak untuk sementara, tetapi selama pelaku itu hidup.

Istilah "peranan" menunjukkan bahwa masyarakat "memiliki lakon", bahkan masyarakat adalah lakon itu sendiri. Masyarakat adalah suatu lakon yang masih aktual, lakon yang besar, yang terdiri dari bagian-bagian dan pementasannya diserahkan kepada anggota-anggota masyarakat. Lakon masyarakat itu disebut fungsi atau tugas masyarakat. Jadi peranan sosial adalah bagian dari fungsi sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh orang atau kelompok tertentu, menurut pola kelakuan lahiriah dan batiniah yang telah ditentukan.

Peranan sosial yang ada di dalam masyarakat dapat diklasifikasi menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang yang diambil. Berikut jenis-jenis peranan sosial[5]:

1. Peranan yang Diharapkan *(Expected Roles)* dan Peranan yang Disesuaikan *(Actual Roles)*

[5] Hendropuspito, *Sosiologi Sistematik.* Kanisius, Yogyakarta, 1989. 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya, lengkap, sesuai dengan peraturan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatic dan sebagainya. Peranan-peranan ini merupakan peranan yang "tidak dapat ditawar", harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Disamping peranan tersebut, terdapat peranan lain yang pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, bahkan kadang-kadang harus disesuaikan. Peranan ini disebut peranan yang disesuaikan. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situai setempat, tetapi kekurangan yang muncul dianggap wajar oleh masyarakat.

Peranan yang diharapkan tidak selalu dapat dilakukan secara murni dan lengkap. Hal ini dapat dilihat dari manusia yang melaksanakan peranan itu. Setiap manusia memiliki watak yang khas pribadi, memiliki rasa tersendiri terhadap tugasnya. Pengalaman, usia, jenis kelamin, dan tempat pendidikan akan membentuk seseorang sebagai pribadi yang khas. Walau seseorang memenuhi syarat-syarat yang formal untuk memangku dan memainkan peranan tertentu, sama seperti rekan-rekan sejabatan, dia akan "mementaskan" peranannya dengan warna dan rasa yang berbeda.

2. Peranan Bawaan *(Ascribed Roles)* dan Peranan Pilihan *(Achieved Roles)*

Dua jenis peranan tersebut muncul sejajar dengan dua jenis status yang senama, yaitu *ascribed status* dan *achieved status*, atau status yang diperoleh tanpa usaha sendiri dan status yang diperoleh atas usaha sendiri. Status dan peranan bersifat korelatif, di mana ada status, di situlah ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peranan. Peranan bawaan muncul dari status bawaan, peranan pilihan muncul dari status pilihan.

Peranan bawaan adalah peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Kadang-kadang secara tidak langsung terdapat unsur pilihn untuk memperoleh peranan bawaan, misalnya peranan ibu dan bapak. Sebagian besar peranan (pekerjaan) hanya dpat diperoleh melalui usaha orang yang berkepetingan. Jenis peranan inilah yang disebut dengan peranan pilihan. Orang yang bersangkutan harus menentukan sendiri peranan (pekerjaan) yang ia inginkan. Jika pilihan jatuh pada satu peranan yang susuai degan bakatnya, ia masih harus berusaha dan belajar memahirkan diri dalam peranan itu melalui jalur pendidikan serta latihan.

3. Peranan Kunci *(Key Roles)* dan Peranan Tambahan *(Supplementary Roles)*
   a. Peranan kunci muncul dari kedudukan (status) kunci. Peranan utama timbul dari kedudukan utama. Seseorang yang menempati kedudukan utama akan memainkan peranan utama. Dalam bahasa populis status kunci sering dikatakan kedudukan "penting" dan peran kunci dikatakan peranan "penting" atau "tugas penting". Tetapi kedudukan penting tidak selalu status kunci, demikian pula tugas penting tidak selalu sama dengan peranan kunci. Yang dimaksud dengan kedudukan kunci ialah kedudukan yang dominan sedemikian rupa, sehingga kedudukan lain harus mengalah terhadapnya. Jika ditainjau dari orangnya, kedudukan kunci merupakan kedudukan yang memainkan pengaruh besar atas pembentukan pribadi lahir dan batin pemegang status. Peranan kunci

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyita sebagian besar perhatian pemegangnya. Kegiatan-kegiatan lain yang bukan peranan utama harus dikalahkan apabila peranan utama itu memanggilnya. Peranan kunci seseorang menjadi sumber utama dari penghidupan orang itu. Seseorang mungkin ikut aktif dalam aneka kegiatan, dan mendapat penghasilan tambahan dari kegiatan-kegiatan itu, tetapi itu semua adalah penghasilan sekunder. Peranan kunci menuntut pendidikan dan latihan tersendiri melalui jalur pendidikan atau latihan formal maupun informal. Peranan kunci menuntut pertanggungjawaban terbesar dari pemegangnya terhadap masyarakat umumnya dan terhadap instansi pemegang status khususnya, di mana yang bersangkutan menjadi anggota.

b. Peranan tambahan tidak dijadikan faktor terpenting untuk mengembangkan kepribadian pemegang peranan itu, melainkan hanya untuk menambah pengalamannya. Orang yang melakukan peranan tambahan tidak mencurahkan perhatiannya sebesar yang dia curahkan kepada peranan kunci. Tugas-tugas sampingan dapat mendatangkan penghasilan relatif besar, tetapi tidak dipandang sebagi sumber utama penghidupan orang yang bersangkutan. Peranan tambahan itu mungkin dilakukan berdasarkan ijazah keahlian tertentu, tetapi baik pemegang ijazah itu maupun masyarakat sekitarnya tidak memandangnya setinggi dia dan masyarakat tetap memandang ijazah peranan utamanya. Peranan tambahan tidak menuntutpertanggungjawaban seberat peranan utama.

4. Peranan Golongan dan Peranan Bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara empiris dapat diketahui, bahwa setiap orang melakukan peranan sebanyak kumpulan yang dimasukinya. Peranan golongan mengandung arti sama dengan peranan kelompok, karena orang-orang yang memiliki ciri yang sama. Dalam hal ini ialah peranan yang sama dan mewujudkan ketegori sosial. Sedangkan peranan bagian ini diperankan oleh orang tertentu yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu pada instansi.

5. Peranan Tinggi, Peranan Menengah, Peranan Rendah

Setiap peranan sosial berasal langsung dari status sosial, maka peranan tinggi, menengah, dan rendah tergantung pada tinggi rendahnya status sosial ditempati seseorang atau golongan.

Konsep untuk menggolongkan fenomena peran meliputi beberapa konsep. *Pertama,* konsep-konsep yang menggambarkan aspek yang signifikan dari perilaku dalam kehidupan nyata yang kompleks. *Kedua,* konsep-konsep ini dimaksudkan sebagai konsep yang umum, mandiri, tajam, dan komperhensif, meskipun bukan merupakan konsep yang tuntas dan lengkap. *Ketiga,* dengan penggolongan, baik pada konsep, ubahan, maupun ciri-ciri fenomenanya pembaca akan dipermudah dalam mendefinisikan mana yang termasuk hal yang deskriptif, teoritis ataupun keduanya. Terdapat penggolongan dalam teori ini, *Pertama,* penggolongan yang mengacu pada apa yang disebut "acuan fenomenal" misalkan, istilah individual memiliki acuan fenomenal berupa seseorang, norma memiliki acuan fenomenal berupa suatu perilaku, sedangkan posisi memiliki acuan fenomenal berupa orang dan perilakunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, penggolongan yang merujuk pada operasi konseptual yang disertakan dalam pembentukan suatu sub kelas dari acuan fenomenal. "individual" dalam hal ini merupakan suatu konsep yang didasarkan pada suatu pembagian analitis dari acuan fenomenal berupa orang. *Ketiga*, formulasi kriteria yang beraneka ragam, yang digunakan untuk mengelompokkan sub-kelas dari acuan fenomenal. *Keempat*, konsep golongan, yang memiliki elemen kategoris, misalnya pembagian menurut jenis pekerjaan. Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Dengan demikian, suatu posisi dapat saja dibedakan menurut perilaku maupun bukan perilaku.[6]

Adapun makna dari kata "peran" dapat dijelaskan secara historis, yang menyebutkan konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang dimainkan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.

Suatu penjelasan tentang "peran" juga merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Peran secara operasional memiliki makna bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama

---

[6] [6] Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Dervasi dan Implikasinya*, (Jakarta,: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada dalam suatu “penampilan/unjuk peran”. Hubungan antara pelaku perannya yang bersifat saling terkait dan saling mengisi karena dalam konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain. Dengan ungkapan lain bahwa suatu peran akan memenuhi keberadaannya, jika berada dalam kaitan posisi yang menyertakan dua pelaku peran yang saling mengisi atau saling melengkapi.

Paham yang digunakan dalam mengkaji teori peran ini adalah paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural serta mengacu ke perangkat hak dan kewajiban yang secara normatif telah dicanangkan oleh sistem budaya. Sistem budaya tersebut menyediakan suatu sistem posisional, yang menunjuk pada suatu unit dari struktur sosial yang pada intinya konsep struktur menonjolkan suatu konotasi pasif-statis antara posisi satu dengan lainnya. Paham kedua, paham intaraksionis lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran terutama setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran yang bersifat lebih hidup. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya.

2. Teori Komunikasi Politik

Definisi Komunikasi Politik Secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita -cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjut Nimmo menjelaskan, kadang -kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.[7]

Menurut Maswadi Rauf, Pengertian Komunikasi Politik adalah sebagai objek kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Maswadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan pollitik dan sebagai kegiatan ilmiah.[8]

Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empirik karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial, sedangkan komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah maka komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.

Menurut Rusadi Kantaprawira seorang pakar hukum, Pengertian Komunikasi Politik adalah penghubungan pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat, baik itu pikiran intern golongan, asosiasi, instansi ataupun sektor

---

[7] Ali, novel.Peradaban komunikasi politik, (Bandung: remaja rosdakarya 1999), 120.
[8] Rochhajat Harun dan Sumarno AP. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. (Bandung: CV Mandar Maju , 2006), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan politik pemerintan. Rusadi melihat komunikasi politik dari sisi kegunaannya.[9]

Astrid S. Soesanto mengemukakan pengertian komunikasi politik yang hampir diwarnai kajian ilmu hukum. Pengertian Komunikasi Politik ialah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga pada masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

Dari kata "Mengikat" dan "sanksi" memberi isyarat bahwa disiplin ilmu hukum telah memperkaya formulasi pengertian komunikasi politik yang diungkapkan oleh Astrid, karena kedua kata tersebut adalah terminologi yang biasa digunakan dalam kajian ilmu hukum.

Menurut Roelofs dan Barn Lund, Pengertian Komunikasi Politik adalah politik yang berbicara atau untuk menempatkan masalah ini, lebih tepatnya aktivitas politik (politisasi) berbicara. Dari pengertian komunikasi politik yang diungkapkan Roelofs dan Barn, walaupun sangat sederhana, namun cukup memberi isyarat bahwa komunikasi politik lebih memusatkan kajiannya pada bobot materi muatan yang berisi pesan-pesan politik (isu politik, peristiwa dan perilaku politik individu-individu baik sebagai penguasa maupun yang berada dalam asosiasi-asosiasi kemasyarakatan atau asosiasi politik.

[9] Ardial, Komunikasi Politik, (Jakarta Barat: PT Indeks 2010), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian komunikasi politik yang diungkapkan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Komunikasi Politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti. Komunikasi politik bukan membahas suatu proses yang bersifat temporer atau situasional tertentu, akan tetapi pembahasan komunikasi politik akan menampakkan karakter sebagai identitas keilmuanm baik sebagai ilmu murni yang bersifat ideal dan berada dalam lingkup "*Das Sollen*", maupun berupa ilmu terapan yang berada dalam dunia empiris dalam lingkup wilayah "*Das Sein*".[10]

Komunikasi Politik menggunakan dua pendekatan untuk memahami komunikasi politik itu sendiri, adapun pedekatan yang terdapat pada komunikasi politik diantaranya yaitu: (1) Pendekatan Proses dan (2) Pendekatan Agenda Setting. Pendekatan Proses merupakan salah satu pendekatan yang seringkali digunakan dalam memahami fenomena komunikasi politik. Karena keseluruhan yang ada di dunia merupakan hasil suatu proses. Politik pada dasarnya juga merupakan hasil suatu proses yang panjang. Menurut Hegel dan Marx perkembangan tahapan sejarah merupakan hasil proses konflik yang meningkat melampaui waktu. Sedangkan menurut George Herbert Mead mengungkapkan bahwa kehidupan sosial dapat dipahami sebagai suatu proses, dan setiap kejadian selalu mengandung waktu. Maka bisa dikatakan bahwa pendekatan proses merupakan sumber yang

[10] Ibid, Rochhajat Harun dan Sumarno AP, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensial untuk membangun teori komunikasi politik. Menurut Mead, negosiasi merupakan unsur mutlak dari kehidupan sosial, dan manusia harus bekerja bersama di segala bidang kehidupan.[11]

Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan agenda setting. Pendekatan Agenda Setting disini dikembangkan oleh Maxwell C. McCombs, pendekatan ini dimulai dari asumsi bahwa adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan oleh media pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan oleh kahayalak. Sehingga media massa digunakan dalam komunkasi politik untuk mempengaruhi publik.

Politik pada dasarnya juga seperti komunikasi merupakan suatu tindakan yang melibatkan pembicaraan. Dalam hal ini tidak sekedar melakukan pembicaraan dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti yang luas baik bersifat verbal (lisan atau tulisan) maupun yang bersifat nonverbal (gerak, isyarat dan tindakan). Nimno membedakan politik dapat terjadi dalam setiap setting politik, tidak saja dalam tingkat Negara bagian, provinsi, kabupaten maupun desa.[12]

Mark Roelofs mengemukakan bahwa kegiatan politik adalah berbicara, tetapi bukan berarti hanya sebatas pembicaraan saja, namun hakikat pengalaman politik dan kondisi dasarnya adalah aktivitas komunikasi antar manusia. Roelofs berpendapat bahwa komunikasi meliputi politik jika orang

---

[11] Henry Subiakto, Rachmah Ida. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi Edisi Kedua*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 11.
[12] Nimno, Dann. *Komunikasi Politik.* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapkan pada konflik, sehingga mereka akan menurunkan makna perselisihan melalui komunkasi.

Sebagai ilmu terapan, maka bahasan komunikasi akan terus berkembang mengikuti perubahan-perubahan dan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi atau mengikuti temuan-temuan teoritis, produk berpikir dan hasil penelitian dari para ilmuwan. Sekian pembahasan mengenai pengertian komunikasi politik, semoga tulisan saya mengenai pengertian komunikasi politik dapat bermanfaat.

Maka Kesimpulan utama yang perlu diambil dari uraian tentang subtansi Teori Komunikasi Politik ini adalah sebagai berikut. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Jack Plano dkk, kamus analisa politik: komunikasi politik adalah penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur - unsur komunikasi seperti komunikator, pesan dan lainnya.

Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah atau parpol. Namun demikian komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen. Salah satu ciri komunikasi ialah bahwa harus adanya Komunikator politik. Komunikator politik ini memainkan peran utama pada proses opini publik. Komunikator politik disini menempati posisi yang penting dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaringan sosial. Serta menanggapi berbagai tekanan dengan menolak dan memilih informasi yang semuanya terjadi di dalam sistem sosial.[13]

Fungsi komunikasi politik: Komunikasi politik pada hakikatnya berfungsi sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastuktur yang bersifat interdepedensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespon, sehingga mencapai saling pengertian dan diprioritaskan sebesar - besarnya untuk kepentingan rakyat.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Komunkasi Politik dengan memahami bahwa berkomunikasi pada dasarnya, untuk mengutarakan maksud seseorang kepada orang lain. Penting sekali kemudian menerapkan komunikasi yang baik dalam kehidupan politik. Salah satunya memahami konteks berpolitik itu sendiri, dimana akan ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada konstituen dan itu memerlukan strategi komunikasi politik yang baik.

[13] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. (Bandung: Remadja Karya CV, 1989), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id